

Dua Program Prioritas Harus Tetap Berjalan

DPRD Wanti-Wanti Dampak Inpres 1/2025 Tentang Efisiensi Anggaran

JOGJA - Pemkot masih menunggu arahan pemerintah pusat untuk pelaksanaan kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pemerintah. Meski nanti ada efek pemangkasan anggaran, kalangan legislatif mewanti-wanti program prioritas Jogja harus tetap berjalan.

Wakil Ketua I DPRD Kota Jogja Sinarbiyat Nujanat mengatakan, efisiensi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto adalah tentang anggaran di daerah yang bisa tepat sasaran. Sehingga, sejatinya pro-

gram prioritas tak boleh kena imbasnya terutama soal penanganan sampah dan pelayanan kesehatan.

"Dua hal tersebut, wajib tetap menjadi prioritas karena memiliki dampak langsung kepada masyarakat," katanya, kemarin (5/2).

Politikus Partai Gerindra itu menilai, pertimbangan anggaran program penanganan sampah harus tetap dioptimalkan karena selama ini belum terlalu signifikan penyelesaiannya.

Pun, program pelayanan kesehatan masyarakat juga tidak kalah penting karena kebermanfaatannya sangat berdampak langsung. Misalnya, memudahkan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses kese-

hatan gratis melalui pembiayaan dari pemerintah.

"Harapan kami dengan prioritas anggaran persoalan sampah bisa selesai semua. Demikian juga berkaitan dengan kesehatan," ujarnya.

Terkait dengan kebijakan pemberlakuan Inpres 1/2025, dia belum mengetahui secara pasti. Sebab Pemkot juga masih menunggu arahan pemerintah pusat melalui rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurutnya, apabila sudah ada keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaannya, legislatif akan berkoordinasi dengan Pemkot untuk memetakan program-program apa saja yang



Kabinet
Prabowo-Gibran

akan di dievaluasi.

"Sehingga harapan kami anggaran betul-betul bisa efisien dan tepat sasaran," terangnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto menyampaikan, sampai saat ini masih menunggu arahan pusat perihal berbagai penghematan yang dilakukan. Khususnya terkait dengan penerapan efisiensi anggaran.

Kendati demikian, dipastikan bahwa Pemkot tetap akan mengambil kebijakan sesuai kebutuhan agar tidak mengganggu pelayanan di masyarakat. Termasuk memprioritaskan program penanganan sampah, layanan kesehatan, serta pendidikan. "Program-program yang menasar kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas," tegasnya. (inu/wia/zi)